



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
WILAYAH JAWA BARAT

ISSN-SNAB-2252-3936



PROCEEDINGS

**PROFESIONALISME AKUNTAN MENUJU
SUSTAINABLE BUSINESS PRACTICE**

KAMIS, 20 JULI 2017 | BANDUNG, JAWA BARAT

URGENSI AKUNTAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN : PERSPEKTIF INSTITUSIONAL

Anisa Kusumawardani¹, Irwansyah², Ledy Setiawati³, Yoremia Lestari Ginting⁴

1,2,3,4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman
Samarinda, Kalimantan Timur
Email: irwansyah@feb.unmul.ac.id

ABSTRAK

Meningkatnya kesadaran perusahaan, sebagai sebuah institusi, atas pertanggung jawaban sosial salah satunya didasari oleh meningkatnya ketentuan pemerintah yang mengatur praktik CSR sebagai suatu indikator *good corporate governance*. Kebutuhan perusahaan akan penyusunan *Sustainability Report* bahkan mencuatnya isu *Integrated Reporting*, berimplikasi juga pada kebutuhan akan profesi akuntan yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi sosial dan lingkungan. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan perusahaan akan akuntan yang memiliki kompetensi tersebut. Teori Institusional sebagai alat analisis untuk memaknai institusionalisasi kebutuhan perusahaan akan kompetensi profesi akuntan dari sudut pandang institusi. Data berupa hasil interview dengan para informan yang merupakan pelaku penyusunan laporan keberlanjutan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penyusunan laporan keberlanjutan dilakukan oleh non-akuntan dikarenakan penekanan perusahaan adalah pada sisi implementasi, orientasi pelaporan adalah untuk memenuhi regulasi, dan minimnya sumberdaya akuntan yang berkompeten di bidang akuntansi sosial dan lingkungan. Penelitian ini berkontribusi bagi perguruan tinggi dalam melihat market signal yang tergambar pada perkembangan kebutuhan stakeholders akan informasi mengenai pertanggung jawaban sosial dan lingkungan perusahaan, yang berarti bahwa lulusan sarjana akuntansi sudah seharusnya meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan.

Kata kunci: Akuntansi sosial dan lingkungan, Kompetensi akuntan, Laporan keberlanjutan, Teori institusional

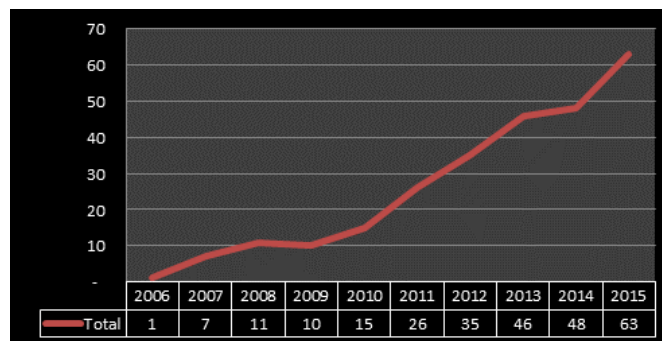
1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan berkembangnya waktu, pemahaman arti dan manfaat nilai usaha dalam bisnis mengalami pergeseran konsep bisnis dari *single P* yaitu *profit* menjadi 3P (*TripleBottom Line*) (Lindawati dan Puspita, 2015). *Triple Bottom Line* yang digagas oleh Elkington (1997) ini merumuskan tiga faktor utama operasi perusahaan, yaitu faktor ekonomi dan keuntungan (*profit*), faktor manusia dan masyarakat (*people*), serta faktor lingkungan (*planet*). Ketiga faktor ini berkaitan satu sama lain. Masyarakat tergantung pada ekonomi; ekonomi dan keuntungan perusahaan tergantung pada masyarakat dan lingkungan, bahkan ekosistem global. Ketiga komponen ini bersifat dinamis, serta tidak bisa lepas dari kondisi dan tekanan sosial, politik, ekonomi dan lingkungan, serta kemungkinan konflik kepentingan. Pendekatan ini untuk memperbaiki pengambilan keputusan tentang kebijakan dan program ke arah yang lebih baik dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan masyarakat sekaligus.

Kinerja perusahaan yang mencerminkan ketiga faktor utama dalam konsep 3P ini dapat ditunjukkan dalam *Sustainability Reporting (SR)* atau laporan keberlanjutan. Laporan ini menjadi sarana bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk menilai sejauhmana perusahaan mengatasi isu keberlanjutan seperti penghematan dan konservasi energi, pengelolaan air, pengelolaan limbah, mengatasi pencemaran udara serta isu social seperti partisipasi perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. *SR* merupakan wujud riil *sustainability accounting* yang dilakukan oleh perusahaan kepada publik. Publikasi laporan ini menjadi potensi

legitimasi bagi perusahaan yang peduli kepada lingkungan atau masyarakat. Artinya masyarakat memperoleh informasi yang memadai dan melegitimasi keberadaan perusahaan di tengah-tengah masyarakat.

Kesadaran perusahaan yang meningkat atas pertanggungjawaban sosial menunjukkan pentingnya laporan tahunan sebagai media pengungkapan praktik tanggung jawab sosial dan lingkungan/*Corporate social responsibility* (CSR). Peningkatan kesadaran ini nampak dari meningkatnya jumlah perusahaan di Indonesia yang mempublikasikan SR dari tahun ke tahun, seperti data yang didapat dari *Global Reporting Initiatives* (GRI), per Februari 2016 terdapat sebanyak 85 perusahaan yang telah membuat dan mempublikasikan laporan mereka. Tren ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



Gambar 1. Pertumbuhan Jumlah Organisasi yang Membuat dan Melaporkan *Sustainability Report* (Sumber: GRI)

Selanjutnya, pelaksanaan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia bersifat *voluntary* dan *mandatory*. Dimana sifat *mandatory* hanya ditujukan bagi BUMN dan perusahaan yang mengolah atau berkaitan langsung dengan sumber daya alam (SDA). Pelaksanaan *mandatory* ini terikat oleh regulasi yang telah ditetapkan dalam UU No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dalam pasal 74 ayat 1-4. Dalam perkembangannya, pelaporan tanggung jawab sosial oleh perusahaan multinasional telah menggunakan pedoman GRI dalam menyusun *sustainability report* yang sebagian besar sudah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan di sektor ekstraktif, sektor genetik, sektor manufaktur, dan jasa.

Namun, tanggung jawab perusahaan tersebut tidak hanya diatur dalam UU No.40 tahun 2007, diberberapa daerah juga dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hal ini. Terutama yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah daerah Kalimantan Timur (Kaltim) yang memang dikenal kaya akan SDA dan beberapa perusahaan besar, yang bergerak di bidang pertambangan dan perkebunan, berada di daerah ini. Sehingga Pemerintah Kaltim telah mengatur pelaksanaan CSR perusahaan yang beroperasi di Kaltim yakni Perda Kaltim No.3/2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Beberapa perusahaan yang telah melaksanakan regulasi-regulasi tersebut, juga menjadikan *Sustainability Report* sebagai media untuk memperoleh kepercayaan dari *stakeholders*.

Peningkatan akan kesadaran dan kepatuhan perusahaan ini berimplikasi juga terhadap meningkatnya keterlibatan akuntan di bidang akuntansi lingkungan (*environmental accounting*). Dalam penelitian Qureshi *et al.* (2012) diungkap bahwa semakin meluasnya praktik akuntansi lingkungan dipicu oleh meningkatnya fokus sosial dan lingkungan, dimana akuntansi semakin berperan luas untuk mengukur kinerja lingkungan. Kondisi ini memberikan kesadaran lingkungan yang dinamis terhadap pelaporan kinerja lingkungan.

Relevansi akuntansi dengan peran perusahaan terhadap masalah sosial dan lingkungan merupakan tugas yang unik bagi akuntan untuk mengembangkan perusahaan sesuai harapan *stakeholders*. Dalam hal ini peran akuntan yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi sosial dan lingkungan semakin dibutuhkan. Indonesia mempunyai akuntan yang bergelar *Certified Sustainability Reporting Specialist* (CSRS) namun masih terbilang sedikit.

Sedangkan, perusahaan yang membuat SR setiap tahunnya meningkat dan seiring dengan hal itu, diperlukan kompetensi tambahan bagi profesi yang mampu membuat SR berdasarkan standar GRI. Hal ini merupakan peluang bagi lulusan akuntansi dari perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga, pemetaan terhadap kebutuhan *stakeholders* terhadap akuntan yang memiliki kompetensi dalam praktik pelaporan CSR atau *sustainability reporting* (SR) penting untuk dilakukan. Berdasarkan fenomena tersebut, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana kebutuhan *stakeholders* terhadap profil akuntan yang berkompeten di bidang akuntansi sosial dan lingkungan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Institusional

Ide utama teori institusional adalah terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Sehingga organisasi yang mengutamakan legitimasi terbentuk oleh lingkungan institusional yang ada di sekitarnya karena organisasi tersebut memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal atau harapan sosial dimana organisasi berada (DiMaggio dan Powell, 1983). Kegagalan memenuhi norma/harapan tersebut akan mengancam legitimasi, sumberdaya, bahkan *survival* perusahaan (Lourenco, *et. al.*, 2012). Menurut DiMaggio dan Powell (1983) proses legitimasi yang sering dilakukan oleh organisasi, yaitu melalui tekanan negara-negara, serta pernyataan-pernyataan. Maka kekhususan teori institusional tersebut terdapat dalam paradigma norma-norma berupa regulasi, dan legitimasi, cara berpikir serta semua fenomena sosio-kultural yang konsisten dengan pelaksanaan instrumen pada organisasi.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dipengaruhi oleh kondisi institusional di wilayah operasi perusahaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, nilai dan norma sosial, serta pengetahuan lokal (pengalaman). Institusionalisasi aturan dan norma menjadi fokus utama dari “penyesuaian” dalam strategi perusahaan yang melakukan pelaporan keberlanjutan dan memungkinkan perusahaan mendapatkan maupun mempertahankan legitimasi Frynas (2009). Oleh karena itu, perusahaan akan mengupayakan beragam cara yang dipandang perlu dalam proses legitimasi. DiMaggio dan Powell (1983) kemudian mengidentifikasi penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi dalam teori institusi, yakni penyesuaian kategorial, penyesuaian struktural, penyesuaian prosedural, dan penyesuaian personil.

2.2. Sustainability Reporting

Sustainability performance menggambarkan kinerja yang dihasilkan oleh tiga pilar *sustainable development*—yakni aktivitas *corporate social responsibility* dan sistem pengelolaan *environmental* tanpa mengorbankan aspek kinerja finansial perusahaan (Wagner, 2010) yang diungkapkan dalam SR. Definisi SR menurut GRI (2006) adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terhadap para stakeholder internal dan eksternal.

Menurut Nuryana (2005) pengungkapan CSR berbeda dengan pengungkapan SR, meskipun keduanya merupakan pengungkapan sosial perusahaan. Pengertian dari CSR itu sendiri adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial di dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi dengan stakeholder berdasarkan prinsip kemitraan dan kesukarelaan, sedangkan SR memuat informasi kinerja keuangan dan informasi non keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang lebih menekankan pada prinsip dan standar pengungkapan yang mampu mencerminkan tingkat aktivitas perusahaan secara menyeluruh sehingga memungkinkan perusahaan bisa tumbuh secara berkesinambungan.

Manfaat yang diperoleh dari pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*) menurut *World Business Council for Sustainable Development* antara lain: (1) SR memberikan informasi kepada stakeholder (pemegang saham, anggota komunitas lokal dan pemerintah) dan meningkatkan prospek perusahaan, serta membantu mewujudkan transparansi; (2) SR dapat membantu membangun reputasi sebagai alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan *brand value*, market share dan loyalitas konsumen jangka panjang; (3) SR dapat menjadi cerminan bagaimana perusahaan mengelola risikonya; (4) SR dapat digunakan sebagai stimulasi *leadership thinking* dan *performance* yang didukung dengan semangat kompetisi; (5) SR dapat mengembangkan dan memfasilitasi pengimplementasian dari sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak lingkungan, ekonomi dan sosial; (6) SR cenderung mencerminkan secara langsung kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk jangka panjang; (7) SR membantu membangun ketertarikan para pemegang saham dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan bagaimana meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji perspektif informan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dan sudut pandang informan (Sugiyono, 2006). Dimana penelitian ini mencoba mengidentifikasi kebutuhan pengguna akan akuntan yang berkompoten dalam bidang akuntansi sosial dan lingkungan dilihat dari sudut pandang *institusi* atau perusahaan yang menerbitkan SR. Sedangkan, pendekatan studi kasus sendiri digunakan untuk memperoleh gambaran beberapa aspek khusus yang perlu dipelajari secara intensif dan mendalam.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan informan dari perusahaan pertambangan (khususnya) yang beroperasi di Kaltim yang terikat dengan aturan UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Perda Kaltim No.3/2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Mengapa perusahaan pertambangan? Sebab perusahaan di bidang ini termasuk usaha yang mendominasi di daerah Kaltim dan terdapat kecenderungan melakukan eksploitasi alam. Dimana perusahaan-perusahaan tersebut berkewajiban melaksanakan dan melaporkan program CSR kepada pemerintah dan masyarakat, sehingga dirasa membutuhkan akuntan di bidang sosial dan lingkungan dalam penyusunan program sampai dengan pelaporannya.

Profil perusahaan dalam penelitian ini diperoleh dari data *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR). Dimana perusahaan yang menjadi anggota dalam NCSR wajib menyusun dan melaporkan kegiatan CSR-nya dalam *Sustainability Reporting* berdasarkan GRI. Langkah berikutnya, peneliti melakukan wawancara kepada informan yang terlibat langsung bidang yang terkait dalam penyusunan dan pelaporan kegiatan CSR perusahaan. Selanjutnya informasi yang diperoleh dari proses tersebut akan dianalisis dengan menggunakan identifikasi “penyesuaian” institusi dalam teori institusional untuk memaknai bagaimana institusionalisasi kebutuhan perusahaan atas akuntan yang tidak hanya memahami *skill* dasar akuntansi namun juga memiliki kompetensi di bidang akuntansi sosial dan lingkungan. Berikut dipaparkan secara singkat beberapa informan dari perusahaan yang dilibatkan dalam penelitian:

Tabel. 1 Data Informan dalam Penelitian

Informan	Keterangan
Mrs. N	Manager Community Empowerment, Perusahaan K
Mr. R	Specialist Reporting & Data Management, Perusahaan K
Mrs. A	Community Development Head, Perusahaan I
Mr. G	Human Resources Head, Perusahaan I

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 “Penyesuaian” Institusional dalam Pelaporan Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pada bagian ini, peneliti akan melakukan analisis data hasil *interview* dengan para informan dalam perspektif teori institusi dan membahasnya terkait tahap “penyesuaian” yang dilakukan perusahaan atas realitas pertanggungjawaban sosial dan lingkungan yang terjadi disekitarnya. Fokus utama pelaporan keberlanjutan bagi perusahaan apabila dilihat dari perspektif institusional adalah kepatuhan terhadap regulasi, dimana dalam penelitian ini regulasi yang dimaksud yaitu regulasi untuk pengungkapan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan berupa UU No. 40 tahun 2007 pasal 66 ayat (2) tentang Perseroan Terbatas (PT) dan regulasi pemerintah Daerah seperti Perda Kaltim No.3/2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, serta menyesuaikan dengan agenda pemerintah setempat. Kondisi ini di “amin” kan oleh informan dari perusahaan yang mengungkapkan tentang bagaimana mereka menginstitutionalisasi peraturan terkait dalam isntitusinya:

“...implementasi CSR kami lakukan berdasarkan UU PT, Perda juga” (Mrs.A)

Selanjutnya hal ini juga mempengaruhi strategi yang dilakukan perusahaan dalam proses bisnisnya:

“Salah satu mengacu pada agenda pemerintah Kutim (Kutai Timur) di bidang Agribisnis. Karena ini daerah baru. Itulah yang kami kerjakan bersama, dengan berbagai strategi.” (Mrs.N)

Alasan perusahaan melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dikarenakan kegiatan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan tersebut diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dimana menyatakan bahwa perseroan yang bidang usahanya terkait dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial, dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Serta bagi pelanggar yang melanggar undang–undang tersebut maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan tersebut. Maka berdasarkan teori institusional, kondisi tersebut merupakan bentuk dari tahap **penyesuaian kategorial**, dimana keseragaman yang dilakukan organisasi didasari oleh sebuah sistem keyakinan kognitif (dalam hal ini berhubungan dengan penginternalisasian peraturan terkait tanggung jawab sosial perusahaan), karena akan memperbesar legitimasi mereka dan akan menambah sumber dan kapasitas ketahanan mereka (DiMaggio dan Powell, 1992).

Ternyata disamping alasan kepatuhan akan aturan, perusahaan melakukan kegiatan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu karena tuntutan yang disampaikan oleh lingkungan bisnis, masyarakat dan organisasi non pemerintahan. Saat sebuah perusahaan melakukan program CSR dan melakukan pelaporan, mereka juga bisa terlibat dengan pihak-pihak lain yang memperhatikannya, diluar pemerintah, seperti yang diungkapkan oleh informan berikut:

“ Kita juga diatur oleh forum CSR. Kita ada zona tersendiri, kita saling berbagi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih ”. (Mrs.A)

Selanjutnya, dalam tahap **penyesuaian struktural**, dijelaskan oleh DiMaggio dan Powel (1992) muncul karena dampak dari peraturan pemerintah tadi, ketidakpastian lingkungan atau kebutuhan akan legitimasi. Sehingga, sebagai sebuah institusi, perusahaan yang menginstitutionalisasi aturan tersebut berkewajiban melakukan kegiatan pertanggungjawaban lingkungan dan sosial. Untuk kemudian mengungkapkan aktivitas tanggungjawab sosial dan lingkungannya itu kepada para *stakeholder* sebagai salah satu upaya perolehan legitimasinya. Namun, walaupun dalam peraturan tersebut pengungkapan tanggungjawab sosial di Indonesia sudah wajib diungkap, namun item-item tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang diungkapkan oleh perusahaan, merupakan informasi yang masih bersifat sukarela (*voluntary*). Dari kacamata teori institusi, hal ini merupakan bagian dari **penyesuaian prosedural**, yakni saat organisasi biasanya terpengaruh untuk melakukan sesuatu dalam beberapa cara pula. Maka dengan adanya karakter sukarela, perusahaan dapat mengoperasionalkan pelaporan atas aturan-aturan tadi sesuai dengan kebijakan

dan aktivitas yang dilakukannya. Di samping itu dikarenakan adanya pilihan-pilihan bentuk implementasi CSR yang halal dilakukan perusahaan. Terkait kondisi ini, dapat dilihat dari apa yang diutarakan oleh beberapa informan:

“...kegiatan CSR kami laporkan dalam SR, juga ada yang dalam bentuk laporan implementasi CSR saja” (Mrs.N)

“Yang ini (menunjuk pada laporan implementasi-red) dilaporkan ke Bupati dan SR kepada buyer, mereka yang lebih banyak menanyakan sekarang” (Mr.R)

Laporan kegiatan pertanggungjawaban lingkungan dan sosial perusahaan juga disesuaikan dengan kebutuhan pemakai informasi. Untuk laporan ke pemerintah lokal atau masyarakat di sekitar daerah perusahaan beroperasi, perusahaan memberikan laporan implementasi dari kegiatan CSR saja, namun untuk kebutuhan pemakai informasi yang lebih luas seperti investor maupun pelanggan perusahaan dalam bentuk SR. Inilah lebih jelasnya bentuk dari penyesuaian prosedural yang dilakukan intitusi perusahaan.

4.2 “Penyesuaian” Personil: Pelaku Pelaporan Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Identifikasi penyesuaian organisasi berikutnya dalam teori institusional setelah dilakukannya tahap penyesuaian kategorial, struktural dan prosedural yang telah dijelaskan sebelumnya adalah tahap penyesuaian personil (DiMaggio dan Powell, 1983:147). Bentuk penyesuaian tersebut antara lain menggunakan personil yang spesifik, kebutuhan terhadap lisensi atau akreditasi untuk memenuhi kualifikasi personil dalam posisi kunci. Pada tahap ini, perusahaan berkolaborasi dengan para profesional, dengan mempertimbangkan pengalaman dan pelatihan mereka, untuk menghasilkan pengetahuan profesional yang akan mengatasi masalah (Martinez, *et.al*, 2016) dalam hal ini yaitu pelaporan keberlanjutan. Bentuk penyesuaian ini dapat dilihat dari penjelasan informan berikut yang menjelaskan bagaimana mereka memadankan kompetensi personilnya di bidang terkait:

“Kami mengikuti training di NCSR, mereka penyelenggara yang kerjasama dengan GRI. Mereka kompeten di bidangnya”. (Mr.R)

Diungkapkan lebih lanjut oleh Mrs. N:

“Bagi yang menulis (penyusun laporan), di tempat kami saya gak tahu udah berapa anggota, jadi kita semua dikursusin untuk menulis report dengan Global Reporting Inisiative. Jadi kita belajar bagaimana menyusun itu (laporan keberlanjutan-red)”.
(Mrs N)

Dalam hal ini, penyesuaian personil yang dilakukan perusahaan terhadap aturan-aturan institusi dimana organisasi modern diatur oleh berbagai aturan spesialisasi, biasanya disertai dengan sertifikat profesional. Di sini sertifikat menjadi sangat penting sebagai bagian dari penyesuaian yang dilakukan organisasi. Disamping itu, personil handal menurut perusahaan adalah orang-orang yang telah mengikuti *training* GRI. Di Indonesia, penyelenggara *Training* GRI adalah *National Center for Sustainability Reporting* (NCSR) yang merupakan Mitra Pelatihan Bersertifikat GRI, telah berpengalaman dalam memberikan pelatihan sertifikasi profesional untuk Pelaporan Keberlanjutan sejak tahun 2007. Setelah mengikuti training tersebut, peserta yang lulus ujian untuk mendapat sertifikasi berhak mendapat gelar CSRS (*Certified Sustainability Reporting Specialist*). Perspektif institusional memandang sertifikasi merupakan sinyal bahwa perusahaan memiliki personil yang handal dalam pelaporan.

Program CSRS berfokus pada orang yang ingin mendapatkan pengetahuan lebih dalam dalam manajemen berkelanjutan CSR yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, manajemen, pelaporan dan akuntabilitas. *Training* CSRS ini tidak mensyaratkan kualifikasi tertentu, misal *training* ini dapat diikuti oleh lulusan strata satu dari segala disiplin ilmu. Pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan keterampilan untuk menyusun *best practice-sustainability report*, dengan menggunakan acuan dari *Global Reporting Initiative* (GRI). Walaupun sertifikasi CSRS dapat diikuti multidisiplin ilmu, namun sebagai akutan semestinya hal ini ditangkap sebagai

sebuah peluang dan tantangan. Sebab aktivitas yang ada dalam laporan keberlanjutan yang dibuat perusahaan sebenarnya merupakan bagian yang wajib dilaporkan nilai materinya dalam laporan keuangan perusahaan sehingga tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan akuntansi yang mengikutinya. Berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 perusahaan wajib menganggarkan dan memperhitungkan aktivitas CSR sebagai biaya perseroan (*cost/expenses*) sesuai kepatutan dan kewajiban. Maka bentuk penyesuaian personil yang diutarakan institusi ini dapat menjadi sinyal kebutuhan akan profesional akuntan yang memiliki kompetensi holistik tersebut.

4.4 Transformasi *Sustainability Reporting* menuju *Integrated Reporting*: Peluang Baru Bagi Akuntan?

Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) semakin mendapat perhatian dalam praktek bisnis global dan menjadi salah satu kriteria dalam menilai tanggung jawab sosial dan lingkungan suatu perusahaan. Menurut Said, *et.al.* (2009), bahwa laporan keberlanjutan menjamin akan kepentingan pemegang saham, atau investor yang ada, sehingga perlu adanya keterkaitan dengan implementasi tatakelola perusahaan yang efektif. Selain SR sebagai pengungkapan laporan yang lebih komprehensif (tidak hanya sebagai laporan keuangan saja), SR juga mendukung strategi perusahaan, serta dapat menunjukkan komitmen terhadap perkembangan berkelanjutan (Dilling, 2010, h.19).

Namun dalam praktiknya, perusahaan mengindikasikan minimnya sumberdaya akuntan yang juga memiliki pemahaman dan sertifikasi terkait bidang pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Atau dalam ranah akuntansi kompetensi ini berada dalam lingkup akuntansi sosial dan lingkungan (seringkali diistilahkan dengan *environmental accounting* atau *green accounting* atau *sustainability accounting*). Meski diakui perusahaan bahwa akan sangat membantu dalam praktiknya apabila mereka memiliki personil akuntan yang menawarkan kompetensi di bidang tersebut. Kekosongan profesional akuntan pada bagian pelaporan CSR di perusahaan meraka ditunjukkan dari komentar informan berikut:

“..untuk penyusunan Sustainability Reporting, disini divisinya disebut Specialist Reporting and Data Management. Di bagian ini memang tidak ada orang akuntansi. Yang berkembang di Indonesia yang mengerjakan banyak bukan orang akuntansi. Sebetulnya dari berbagai macam background juga bisa. Menurut saya ya... Saya sendiri orang bahasa. Karena gak mungkin dikerjain sendiri. Karena banyak indikatornya, gak mungkin kerjain sendiri.. karena melibatkan banyak orang dengan berlatar belakang banyak kompetensi.” (Mr. R)

“peran accounting dalam proses CSR ini dimana, saya tidak tahu secara pasti. Bisa jadi kan kalo kita bicarakan auditing... apakah ini ada regulasi khusus pemerintah harus dikaitkan... kalau kita mengaudit program CSR gimana caranya... Menarik sebenarnya, karena CSR ini uang bebas, perlu accountable dalam process sampai reportingnya” (Mr.G)

Informan yang merupakan bagian *Human Resource* menyebutkan bahwa selama ini kebutuhan personil belum mengarah kepada spesialisasi di bidang akuntansi sosial dan lingkungan. Namun, ke depannya pasti mengarah kepada kompetensi di bidang pelaporan Sustainability Reporting maupun Assurance/Audit. Sertifikasi untuk kompetensi di bidang penyusunan pelaporan disebut sebagai Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS), dan untuk bidang assurance disebut sebagai Certified Sustainability Reporting Assurer (CSRA).

Ketika sebuah laporan keberlanjutan menjadi penting, maka saat itu pula profesi CSRS menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam rantai penghubung informasi dari manajemen perusahaan kepada *stakeholders* perusahaan. Profesi CSRS berperan dalam menyiapkan data dan informasi, menentukan materialitas, juga menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan perusahaan dalam menyiapkan sebuah laporan keberlanjutan yang handal (Kurniawan, 2017). Sedangkan untuk profesi CSRA, menurut NCSR, seorang CSRA memiliki kapabilitas untuk memeriksa

kelengkapan dan kepatuhan laporan keberlanjutan serta menilai pelaporan keberlanjutan termasuk interpretasi data dan kinerja yang dilaporkan.

Perkembangan berikutnya dari pelaporan keberlanjutan adalah munculnya konsep pelaporan terintegrasi (*integrated reporting*). Pelaporan terintegrasi merupakan bentuk penyampaian seluruh informasi baik keuangan, non keuangan, dan aspek-aspek lain perusahaan. Saat ini di berbagai negara, *integrated reporting* (IR) masih pada fase awal pengadopsian. Di Indonesia sendiri pengungkapan IR bersifat sukarela (*voluntary*). Hal itu menunjukkan pentingnya peran akuntan dalam meningkatkan kualitas pelaporan dan mengembangkan tren tuntutan pasar global, yaitu IR. Di masa mendatang, IR berpotensi menjadi model utama pelaporan perusahaan. Perkembangan IR dan adanya tuntutan *stakeholders* menjadi tantangan bagi perusahaan dan profesi akuntan untuk meningkatkan kualitas pelaporan khususnya laporan tahunan (Tarigan dan Samuel, 2014).

Namun, Kondisi di Indonesia, profesi CSRS dan CSRA masih langka dijumpai termasuk di dalamnya akuntan yang memiliki sertifikasi tersebut. Ketika GRI ke depannya menjadi sebuah standar, tidak sebagai *guideline*, kemudian era laporan keberlanjutan menjadi era laporan terintegrasi, di sinilah juga letak peluang bagi para akuntan. Maka bentuk penyesuaian yang dilakukan institusi akan berdampak luas sampai pada kebutuhan untuk pemenuhan profesional dalam perusahaan mereka. Contohnya, salah satu spesialisasi dari akuntansi lingkungan ialah pelaporan--terkait bagaimana sumber daya digunakan dan bagaimana dampak lingkungannya--ke pihak eksternal perusahaan seperti investor dan regulator. Lebih dari sekadar akuntan pada umumnya, akuntan sosial dan lingkungan harus dapat bekerja sama dengan profesional dari berbagai disiplin ilmu, termasuk dari kalangan ilmuwan, akademisi, manajer risiko, regulator, dan profesional lainnya. Sehingga, perguruan tinggi sebagai salah satu pihak yang dapat menjadi penyedia akuntan dengan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, untuk mendukung proses institusionalisasinya, sudah semestinya turut mempertimbangkan perkembangan kebutuhan *stakeholder*-nya tersebut.

5. KESIMPULAN

Implementasi UU No 40 Tahun 2007 dan Perda Kaltim No 03/2013 mewajibkan perusahaan melakukan pengungkapan tanggung sosial dan lingkungan. Berdasarkan teori institusional, kondisi ini membuat perusahaan, yang juga merupakan bentuk institusi, melakukan berbagai "penyesuaian" di dalam organisasinya. Penyesuaian-penyesuaian tersebut terjadi dalam berbagai tahap dan tingkatan di dalam tubuh perusahaan, seperti penyesuaian tahap kategorial dimana perusahaan menginstitusionalisasikan peraturan-peraturan pemerintah sebagai bentuk kepatuhan dan demi ketahanan institusinya. Selanjutnya dilakukan penyesuaian struktural, saat internalisasi nilai-nilai dan aturan dari institusi tersebut mempengaruhi struktur dan strategi perusahaan demi perolehan legitimasi, serta dilanjutkan dengan penyesuaian prosedural dalam hal pilihan-pilihan cara yang dilakukan perusahaan untuk mendukung proses institusionalisasi sebelumnya. Tahap lainnya yang tidak kalah penting adalah penyesuaian personil, dimana perusahaan menerapkan kriteria tertentu terkait sumberdaya manusia yang diharapkan dapat membantu tercapainya segala tahap penyesuaian institusi.

Kriteria yang diterapkan perusahaan inilah yang kemudian menjadi bekal bagi peneliti dalam memetakan bagaimana kompetensi profesional yang dibutuhkan oleh perusahaan, khususnya terkait profesi akuntan dengan kompetensi tambahan di bidang akuntansi sosial dan lingkungan. Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk laporan keberlanjutan yang wajib disusun oleh perusahaan selama ini memang masih dilakukan oleh non akuntan, karena minimnya sumber daya yang tersedia dan membuat mereka harus berkolaborasi dengan para profesional dengan berbagai disiplin ilmu. Penyusunan laporan berkelanjutan dilakukan oleh non-akuntan dikarenakan penekanan perusahaan adalah pada sisi implementasi, orientasi pelaporan adalah untuk memenuhi regulasi, dan minimnya sumberdaya akuntan yang berkompeten di bidang akuntansi sosial dan lingkungan. Oleh karena itu peran akuntan yang kompeten pada bidang akuntansi sosial dan lingkungan kemudian sangat dibutuhkan. Hal ini merupakan peluang bagi

Perguruan Tinggi untuk mempersiapkan lulusannya agar mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* akan informasi mengenai pertanggung jawaban sosial dan lingkungan perusahaan, yang berarti bahwa lulusan sarjana akuntansi sudah seharusnya meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan. Pendidikan akuntansi yang berbasis akuntansi sosial dan lingkungan ke depannya perlu dipertimbangkan untuk menjadi salah satu matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan di perguruan tinggi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Dilling. 2009. "Sustainability Reporting In A Global Context : What Are The Characteristics of Corporations That Provide High Quality Sustainability Reports An Empirical Analysis." *International Business & Economics Research Journal* 9 (1), 126-142
- [2]. DiMaggio, P.J. dan W.W. Powell. 1983. *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields*. *American Sociological Review*.
- [3]. DiMaggio and Powell. 1992. *New Institutional Analysis in Organization*. University of Chicago Press.
- [4]. Elkington, J. 1997. *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Oxford: Capstone.
- [5]. Farizhabib, 2016, "Perkembangan Sustainability Reporting di Indonesia", tersedia pada <https://wordpress.com/2016/02/22/perkembangan-sustainability-reportingdi-indonesia/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2017 pukul 23.00
- [6]. Frynas, J.G. 2009. *Beyond Corporate Social Responsibility, Oil Multinationals and Social Challenges*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [7]. Kurniawan, P.S., 2017. "Profesi *Certified Sustainability Reporting Specialist*, Pelaporan Keberlanjutan, dan Teori Enterprise (Suatu Tinjauan Mengenai Profesi CSRS dalam Pelaporan Keberlanjutan)." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 6, No.1. April 2017.
- [8]. Lindawati, A.S.L. dan M.E. Puspita. 2015. "Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma-JAMAL*, Volume 6, Nomor 1, Halaman 1-174
- [9]. Lourenco, I. C., M. C. Branco, J. D. Curto, dan T. Eugenio. 2012. "How Does the Market Value Corporate Sustainability Performance?". *Journal of Business Ethics* 108:417-428.
- [10]. Martínez, J.B., Fernández, M.L., dan Fernández, P.M.R. 2016. "[Corporate social responsibility: Evolution through institutional and stakeholder perspectives](#)". *European Journal of Management and Business Economics* 25 (1), 8-14
- [11]. [National Center for Sustainability Reporting](#). "What is CSRA?." tersedia pada <http://www.ncsr-id.org/csra/what-is-csra/> diakses pada tanggal 12 Juni 2017 pukul 15.45
- [12]. Nuryana, M. 2005. "Corporate Social responsibility dan Kontribusi bagi Pembangunan Berkelanjutan." Makalah yang disampaikan pada diklat pekerjaan sosial industri. Bandung : Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan social (BBPPKS), Lembang
- [13]. Peraturan Daerah Kalimantan Timur No.3/2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
- [14]. Qureshi, N. Z., Kulshrestha D., dan Tiwari S. B. 2012. "Environmental Accounting and Reporting : An essential component of business strategy". *Asian Journal of Research in Banking and Finance*. Vol.2 Issue 4, April 2012.
- [15]. Said, Zainuddin dan Haron. 2009. "The Relationship between Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies." *Social Responsibility Journal* 5(2), p. 212.
- [16]. Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta

- [17]. Tarigan, J. dan Samuel H., “Pengungkapan *Sustainability Report* dan Kinerja Keuangan.” Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 16, No. 2, November 2014.
- [18]. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
- [19]. Wagner, M. 2010. “*The Role of Corporate Sustainability Performance for Economic Performance: A Firm Level Analysis of Moderation Effects.*” Ecological Economics 69:1553-1560.
- [20]. World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 2002. “*Sustainable Development Reporting – Striking a Balance*”. WBCSD Report, Atar Roro Presse, Switzerland.